

ANALISIS DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY BERKALA PENJAMINAN MUTU BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

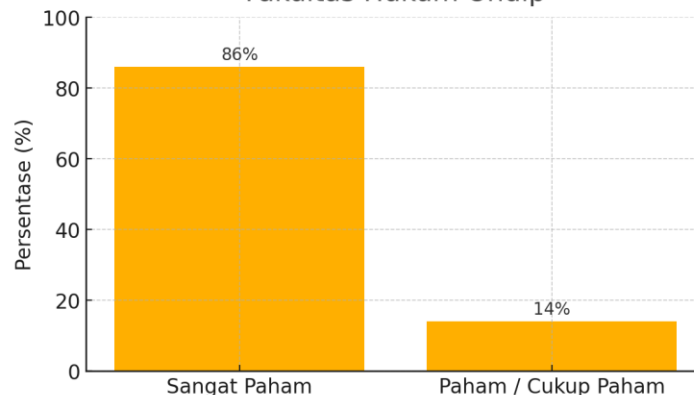
A. ANALISIS HASIL SURVEY BERKALA PENJAMINAN MUTU BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO

Hasil survey berkala penjaminan mutu bagi Tenaga Kependidikan Program Studi Doktor Hukum pada periode bulan **Maret - Mei 2025**:

1. Pemahaman Responden (Tenaga Kependidikan) terhadap Visi dan Misi Fakultas Hukum Undip

Mayoritas tenaga kependidikan Program Doktor Hukum Undip menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup tinggi terhadap visi dan misi Fakultas, dengan 86 % menyatakan “sangat paham” dan 14 % “paham” atau “cukup paham.” Hal ini menandakan bahwa penyampaian visi dan misi belum sepenuhnya merata. Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman ini antara lain: pola akses tenaga kependidikan terhadap informasi, di mana mereka lebih sering membuka newsletter internal atau email resmi ketimbang menelusuri laman web fakultas; kepraktisan kanal singkat seperti grup WhatsApp Prodi yang menyediakan ringkasan inti visi–misi; serta karakteristik mereka yang mayoritas memiliki tugas lapangan sehingga lebih memilih sumber informasi yang instan dan mudah dicapai. Walaupun visi dan misi telah diperkenalkan pada kegiatan orientasi awal Program Doktor, tanpa adanya penyegaran berkala—misalnya melalui sesi town-hall atau modul e-learning—sebagian detail cenderung terlupakan seiring dengan beban kerja administrasi sehari-hari. Fenomena seperti ini umum terjadi terutama ketika informasi strategis dirasa kurang berdampak langsung pada tugas rutin dan evaluasi kinerja mereka.

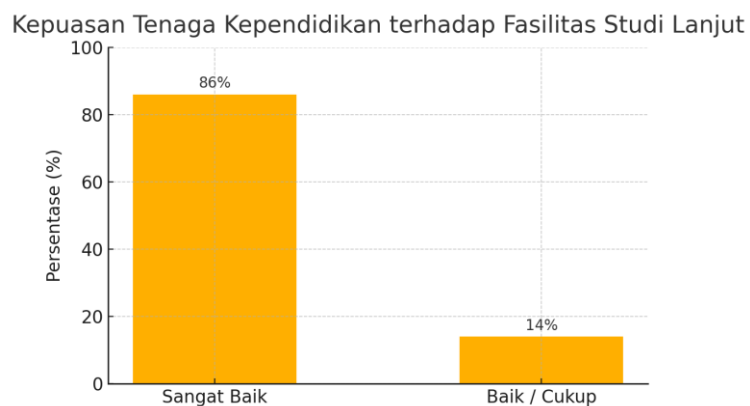
Pemahaman Tenaga Kependidikan terhadap Visi dan Misi Fakultas Hukum Undip



2. Pemahaman Responden (Tenaga Kependidikan) terhadap Visi dan Misi Program Doktor Hukum Undip

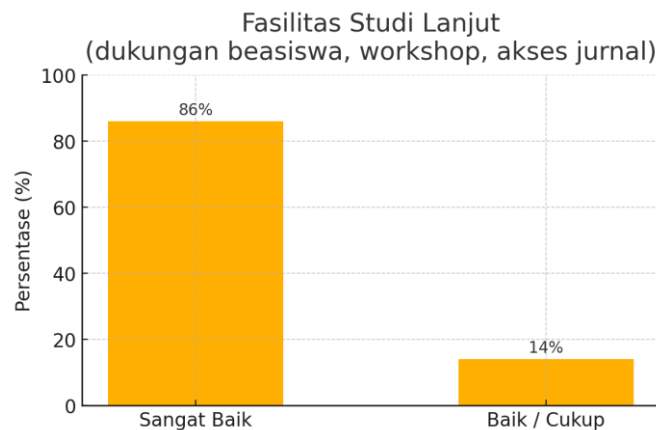
Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap fasilitas studi lanjut yang disediakan oleh Fakultas, dengan 86 % responden menilai “sangat baik” dan 14 % menilai

“baik” atau “cukup.” Capaian ini menggambarkan bahwa mayoritas tenaga kependidikan merasa dukungan Fakultas — mulai dari beasiswa internal, akses langganan jurnal elektronik, hingga workshop penyusunan proposal penelitian — telah memenuhi kebutuhan akademik mereka. Beberapa faktor kunci yang berkontribusi antara lain: ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan SDM, kemitraan strategis dengan perpustakaan nasional dan lembaga riset eksternal, serta panduan prosedur pengajuan yang relatif jelas. Pendekatan proaktif dalam sosialisasi — misalnya melalui sesi briefing triwulanan dan grup WhatsApp khusus beasiswa — juga mempermudah tenaga kependidikan dalam mengakses informasi. Meski demikian, beberapa responden mencatat bahwa alur administrasi dispensasi waktu kerja untuk studi lanjut masih terasa panjang dan berlapis, sehingga disarankan agar tata kelola dan timeline pengajuan dapat dipersingkat atau diotomasi guna meningkatkan efisiensi.



3. Fasilitas Fakultas Atau Universitas Memfasilitasi Kebutuhan Untuk Studi Lanjut

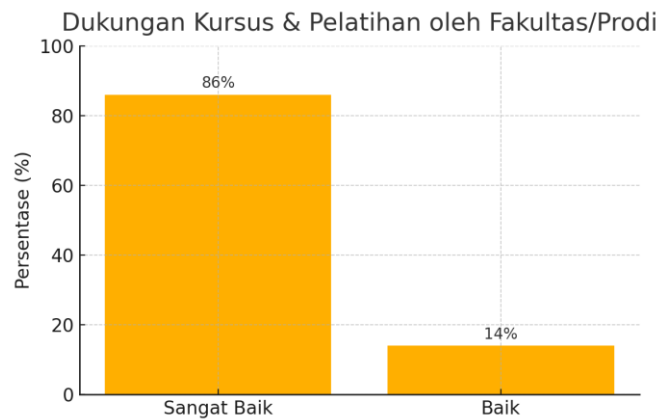
Mayoritas tenaga kependidikan Program Doktor Hukum UNDIP menilai fasilitas yang disediakan Fakultas dan Program Studi dalam mendukung kebutuhan studi lanjut berada dalam kategori “sangat baik”. Dukungan tersebut meliputi pemberian beasiswa internal, penyelenggaraan workshop penyusunan proposal penelitian, serta kemudahan akses terhadap jurnal elektronik, yang semuanya mendapat apresiasi tinggi dari responden. Meskipun demikian, masih terdapat masukan dari beberapa tenaga kependidikan yang menganggap bahwa alur pengajuan dispensasi waktu kerja untuk studi lanjut dirasa panjang dan belum efisien. Oleh karena itu, disarankan agar Fakultas dan Program Studi menyusun alur pengajuan yang lebih ringkas, baku, dan terotomatisasi guna mempermudah proses pengajuan serta meningkatkan efektivitas waktu dan produktivitas tenaga kependidikan.



4. Fasilitas Akses dari Fakultas atau Program Studi Mendukung Pengembangan Diri Untuk Mengikuti Kursus atau Pelatihan

Mayoritas tenaga kependidikan Program Doktor menilai dukungan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan Fakultas sangat memadai, dengan 86 % responden menyatakan “sangat baik” dan 14 % menyatakan “baik.” Tingginya tingkat kepuasan ini menunjukkan bahwa program kursus dan pelatihan tidak hanya bersifat administratif—memberi izin dan anggaran semata—tetapi telah dirancang sebagai bagian integral dari pengembangan kompetensi profesional. Beberapa faktor yang memperkuat keberhasilan ini antara lain:

- Ketersediaan Anggaran Khusus, Alokasi dana pelatihan yang dialokasikan setiap tahun memungkinkan tenaga kependidikan memilih kursus terbaik sesuai kebutuhan, mulai dari manajemen mutu hingga teknologi informasi perpustakaan.
- Kemitraan dengan Lembaga Terpercaya, Kolaborasi dengan universitas lain, pusat riset nasional, dan lembaga sertifikasi profesional menghadirkan materi yang up-to-date dan standar akreditasi yang diakui.
- Format Pelatihan Hybrid dan Modul e-Learning, Kombinasi sesi tatap muka dan daring, lengkap dengan modul video singkat di platform e-learning, memudahkan peserta yang memiliki keterbatasan waktu atau tugas lapangan.
- Pendekatan Mentoring dan Studi Kasus, Setiap pelatihan difasilitasi instruktur berpengalaman yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga membimbing peserta dalam menyusun rencana aksi praktis berdasarkan studi kasus nyata di lingkungan Fakultas.



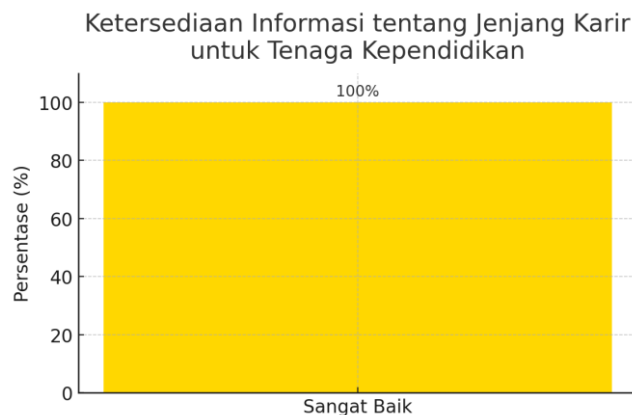
5. Fasilitas Akses dari Fakultas atau Program Studi Mendukung Pengembangan Diri Untuk Mengikuti Seminar atau Workshop

Seluruh tenaga kependidikan Program Doktor Hukum Undip menilai seminar dan workshop yang difasilitasi Fakultas sangat memadai, dengan 100 % menyatakan “sangat baik”, menggambarkan bahwa kegiatan ini tidak sekadar menyampaikan materi tetapi juga menjadi wadah kolaborasi dan pembaruan wawasan. Keberhasilan tersebut didorong oleh pengkinian topik sesuai perkembangan regulasi dan praktik terbaru, format hybrid yang memungkinkan akses rekaman bagi yang berhalangan hadir, serta kolaborasi dengan narasumber ahli dari lembaga mitra yang memperkaya perspektif peserta. Pendekatan partisipatif—melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab—membuat peserta aktif terlibat dalam pemecahan masalah nyata. Beberapa responden merekomendasikan fleksibilitas jadwal dan durasi, sesi tindak lanjut pasca-acara untuk memastikan penerapan materi, serta modul ringkas atau micro-learning sebagai penunjang. Dengan penyempurnaan ini, seminar dan workshop diharapkan semakin efektif dalam meningkatkan kompetensi dan kinerja Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum UNDIP.



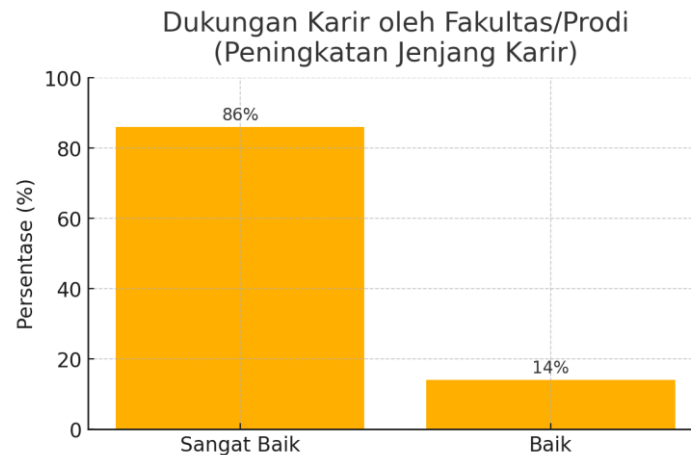
6. Ketersediaan Informasi Bagi Tenaga Kependidikan Mendapat Informasi Tentang Jenjang Karir

Seluruh tenaga kependidikan Program Doktor Hukum Undip menilai informasi mengenai jenjang karir sudah memadai, dengan 100 % menyatakan “sangat baik”, menggambarkan bahwa kebijakan karir telah tersosialisasi melalui SOP di intranet dan rapat koordinasi berkala. Kejelasan ini terutama didukung oleh dokumen prosedur yang terstandar dan sesi tanya jawab dalam forum internal, namun beberapa responden mengungkapkan kesulitan ketika harus mencari informasi yang tersebar di beberapa platform—mulai dari email resmi, folder bersama, hingga catatan rapat. Untuk mengatasi tantangan tersebut, mereka merekomendasikan pembuatan portal karir terpadu yang menampilkan alur promosi, persyaratan jabatan, dan timeline pengajuan dalam satu dashboard interaktif, lengkap dengan notifikasi otomatis dan FAQ terstruktur. Dengan integrasi semacam ini, diharapkan akses informasi menjadi lebih cepat, konsisten, dan mudah diingat oleh seluruh tenaga kependidikan.



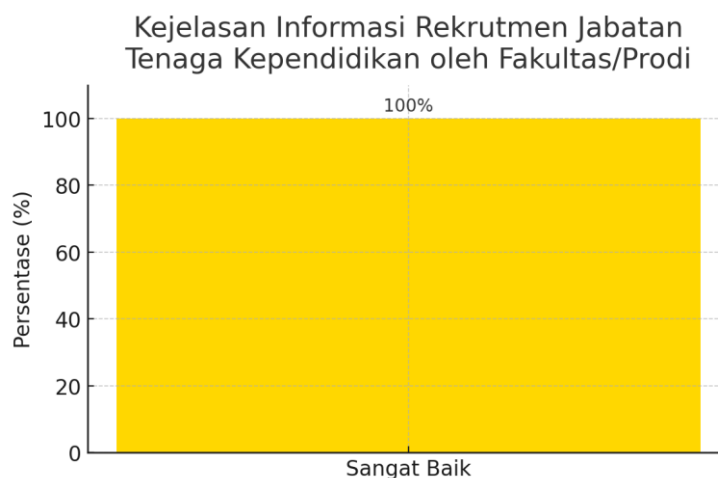
7. Fakultas Atau Program Studi Memberikan Dukungan Dan Kesempatan Untuk Meningkatkan Jenjang Karir

Mayoritas tenaga kependidikan Program Doktor Hukum Undip merasa mendapat dukungan yang kuat untuk peningkatan jenjang karir, dengan 86 % menyatakan “sangat baik” dan 14 % “baik,” menggambarkan bahwa kebijakan pengembangan karir telah dirancang secara komprehensif. Dukungan tersebut tercermin melalui penyelenggaraan workshop kepemimpinan, program sertifikasi manajemen mutu, dan pelatihan soft skills yang diselenggarakan dengan kebutuhan jabatan struktural. Keberhasilan inisiatif ini didorong oleh kemitraan Fakultas dengan lembaga sertifikasi profesional, penyusunan modul kompetensi karir yang berjenjang, serta sesi coaching kelompok kecil yang memfasilitasi diskusi pengalaman dan studi kasus. Meskipun begitu, beberapa responden mengusulkan perluasan program mentoring formal—dengan skema job-shadowing bersama pejabat fakultas dan sesi individual coaching—serta pembuatan platform digital yang memetakan jalur karir, persyaratan promosi, dan jadwal rotasi jabatan dalam satu dasbor terpadu. Dengan penajaman model mentoring dan integrasi sistem informasi karir, diharapkan kesiapan serta mobilitas karir tenaga kependidikan semakin optimal.



8. Fakultas atau Program Studi memberikan informasi tentang rekrutmen jabatan tenaga kependidikan

Seluruh tenaga kependidikan menilai informasi rekrutmen jabatan sangat jelas, dengan 100 % menyatakan “sangat baik”, menggambarkan bahwa mekanisme pengumuman dan persyaratan telah tersampaikan secara efektif. Kejelasan ini terutama didorong oleh grup WhatsApp khusus rekrutmen yang dikelola Prodi, di mana pemberitahuan syarat, tenggat waktu, dan tautan formulir disebar secara real time sehingga meminimalkan risiko terlewatnya informasi. Namun, beberapa responden mencatat bahwa berkas persyaratan dan alur proses masih tersebar di berbagai platform—mulai dari email, Google Drive, hingga intranet—sehingga menyulitkan pencarian dokumen resmi. Untuk itu, mereka merekomendasikan pembuatan satu portal rekrutmen terpadu pada website Prodi yang memuat PDF panduan terstruktur, timeline visual, dan notifikasi otomatis melalui email atau aplikasi messenger. Dengan sentralisasi informasi dan fitur pengingat ini, diharapkan proses rekrutmen menjadi lebih transparan, konsisten, dan mudah diakses oleh seluruh tenaga kependidikan.



Hasil survei ini secara keseluruhan menunjukkan bahwa tenaga kependidikan Program Doktor Hukum Undip sangat puas dengan beragam dukungan yang diberikan, mulai dari fasilitasi studi lanjutan dan kursus/pelatihan—dengan lebih dari dua pertiga responden menilai “sangat baik”—hingga akses seminar/workshop yang interaktif dan kolaboratif, serta kejelasan informasi jenjang karir dan rekrutmen yang dinilai “sangat baik” oleh mayoritas. Faktor kunci kesuksesan meliputi kemitraan strategis dengan lembaga eksternal, format hybrid dengan rekaman, modul e-learning, dan forum diskusi yang memudahkan penyesuaian jadwal tugas lapangan. Meski demikian, beberapa responden mencatat perlunya sosialisasi visi–misi secara berkala, penyederhanaan alur administrasi studi lanjut, dan sentralisasi informasi di satu portal terintegrasi. Mengingat mayoritas tenaga kependidikan juga memiliki tugas operasional di luar akademik, pendekatan layanan yang fleksibel, digital, dan berbasis kebutuhan nyata akan menjadi kunci dalam mempertahankan dan meningkatkan mutu penjaminan mutu.

B. REKOMENDASI TINDAK LANJUT

Berdasarkan delapan aspek hasil survei berkala penjaminan mutu bagi Tenaga Kependidikan Program Doktor Hukum UNDIP, langkah-langkah tindak lanjut yang direkomendasikan adalah:

1. Penguatan Sosialisasi Visi & Misi Fakultas Hukum UNDIP

Meskipun 86% responden “sangat paham” dan 14% “paham”, kami merekomendasikan untuk menampilkan ringkasan visi–misi di header email resmi dan dashboard intranet Fakultas, menyelenggarakan town-hall triwulanan dengan studi kasus penerapan visi–misi, serta mengirim e-leaflet interaktif via WhatsApp Prodi.

2. Refresher Visi & Misi Program Studi Doktor Hukum

Dengan 86 % “sangat paham” namun 14 % “paham,” perlu modul e-learning singkat (5–7 menit) dan poster digital yang dipasang di ruang kerja Tenaga Kependidikan Prodi untuk menjaga ingatan dan pemahaman sepanjang tahun.

3. Penyederhanaan Prosedur Fasilitasi Studi Lanjut

Seluruh responden menilai “sangat baik,” sehingga rekomendasi yang kami berikan adalah bahwa alur dispensasi waktu kerja dan pengajuan beasiswa terasa panjang. Rancang form online terpadu yang otomatis mengirim notifikasi ke atasan, dan sediakan video tutorial (3–5 menit) pada platform digital.

4. Pengembangan Format Hybrid & Micro-Learning untuk Kursus/Pelatihan

Meski 86 % memberikan persepsi “sangat baik,” benturan jadwal kerap terjadi. Tawarkan beberapa sesi paralel (pagi, siang, sore) dan rekaman ≤ 30 menit, serta kembangkan modul micro-learning berupa video pendek dan infografis untuk topik kunci seperti manajemen dokumen dan mutu.

5. Fleksibilitas Jadwal dan Sesi Follow-Up Seminar/Workshop

Dengan 100 % jawaban “sangat baik,” tetap perlu opsi sesi ulang dan arsip rekaman penuh. Tambahkan pula sesi mentoring pasca-workshop dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan implementasi materi pada unit kerja.

6. Pembangunan Dashboard Terpadu Informasi Jenjang Karir

Informasi jenjang karir saat ini tersebar di intranet, email, dan rapat. Kembangkan satu portal online yang memuat SOP karir, persyaratan promosi, timeline, FAQ interaktif, dan notifikasi otomatis via email/WhatsApp bot setiap ada pembaruan.

7. Program Mentoring & Job-Shadowing untuk Peningkatan Jenjang Karir

Untuk memperkuat 86 % responden yang merasa sangat didukung, adakan skema formal job-shadowing bersama pejabat struktural Fakultas atau Program Studi selama 1–2 minggu dan sesi *coaching* individual bagi persiapan peningkatan jenjang karir.

8. Sentralisasi Portal Rekrutmen Jabatan Tenaga Kependidikan

Meskipun 100 % menilai informasi rekrutmen “sangat jelas,” dokumen masih tersebar. Buat portal rekrutmen terpadu di website Prodi berisi panduan PDF terstruktur, timeline visual, dan fitur pengingat otomatis, agar proses lebih transparan dan mudah diakses.

Demikian analisis hasil survey pembelajaran bagi Tenaga Kependidikan Program Studi Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Tim Gugus Penjaminan Mutu untuk dapat ditindaklanjuti sehingga menjadikan perbaikan dalam proses pembelajaran kedepannya.

Analisis dan Rekomendasi Tindak Lanjut atas Hasil Survey Berkala Penjaminan Mutu bagi Tenaga Kependidikan

Semarang, Mei 2025
Ketua Gugus Penjaminan Mutu
Program Studi Doktor Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Dr. Elfia Farida, S.H., M.Hum